Di Sidang Komite Eksekutif GOPAC, Fadli Zon: Peran Parlemen Harus Lebih Kuat dalam Pemberantasan Korupsi

21-12-2023 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menghadiri Sidang Komite Ekeskutif GOPAC (Global Organisation of Parliamentarians Against Corruption/organisasi parlemen global untuk melawan korupsi) di Kota Tashkent, Uzbekistan, Rabu (20/12/2023). Foto : Ist/Man

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menghadiri Sidang Komite Ekeskutif GOPAC (*Global Organisation of Parliamentarians Against Corruption*/organisasi parlemen global untuk melawan korupsi) di Kota Tashkent, Uzbekistan, Rabu (20/12/2023). Dalam acara tersebut Fadli terus menyerukan pentingnya peran parlemen yang lebih konkret terutama dalam mendukung implementasi dari beragam aturan UNCAC.

Light

"Peran parlemen tidak hanya meratifikasi, tapi juga menerjemahkan ke dalam berbagai produk legislasi, pengawasan pelaksanaan UNCAC, serta memastikan keberpihakan anggaran untuk mendukung program-program pemberantasan korupsi," ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria,* di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Mengingat referensi kebijakan anti-korupsi pada level regional masih kurang seperti yang terjadi di ASEAN, Fadli menilai pentingnya terus memperkuat jaringan antarparlemen dalam memberantas korupsi seperti melalui SEAPAC dan GOPAC. Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu juga menyerahkan beberapa inisiatif dan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di ASEAN yang terangkum dalam dokumen *SEAPAC Regional Action Plan Proposal* 2023-2025 beserta kebutuhan pendanaannya. Dokumen proposal tersebut diterima langsung dan disambut positif oleh Ketua GOPAC, yaitu Ali Bin Fetais Al Marri dan para Anggota Komisi Eksekutif lainnya.

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan penganugerahan penghargaan internasional anti-korupsi sesi ke-7 atau the 7th International Anti-Corruption Excellence Award.

Fadli diundang ke acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden GOPAC dan Presiden Organisasi Parlemen Asia Tenggara anti Korupsi atau *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC)

Bukan kali ini saja, Fadli telah rutin menghadiri acara yang digagas oleh Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani itu sejak tahun 2016.

Penganugerahan ini diselenggarakan tiap tahun oleh the *Rule of Law and Anti-Corruption Center* (ROLACC), sebuah organisasi nirlaba yang konsen terhadap isu anti-korupsi berbasis di Doha, Qatar, serta didukung penuh oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Kali ini, penganugerahan tersebut juga bekerja sama dengan Lembaga Anti-Korupsi Republik Uzbekistan.

Dalam kesempatan itu, Fadli Zon lebih dulu menyaksikan langsung peresmian "patung tangan" atau Hand Statue di Pusat Kota Tashkent, Uzbekistan oleh Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani dan Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Patung tersebut merupakan simbol gerakan anti-korupsi global yang saat ini telah dibangun di beberapa kota dunia mulai dari Wina (Austria), Jenewa (Swiss), Tunis (Tunisia), Kigali (Rwanda), Doha (Qatar), dan Putra Jaya (Malaysia).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut kemudian menjadi tamu undangan dalam acara puncak penganugerahan penghargaan anti-korupsi yang dibuka oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Penegakan Hukum Alexandre Zouev, dan Direktur ROLACC dan Presider

Light

Ali Bin Fetais Al Marri serta dihadiri oleh ratusan akademisi, pejabat pemerintahan, anggota parlemen, jurnalis, hingga pegiat anti-korupsi dari seluruh dunia.

Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi dalam empat kategori yaitu pendidikan dan penelitian, jurnalisme investigasi dan inovasi, korupsi di bidang olahraga, serta kategori kreativitas dan keterlibatan pemuda. Penerima penghargaan ini telah tersebar di berbagai negara di dunia dan berlatar belakang berbagai profesi mulai dari pejabat pemerintahan, akademisi, praktisi anti-korupsi hingga jurnalis.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI itu juga menghadiri Sidang Komisi Eksekutif GOPAC dimana ia sendiri merupakan Wakil Ketuanya. Sebagai Presiden GOPAC Chapter ASEAN atau yang dikenal SEAPAC, Fadli menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan selama periode 2022-2023 mulai dari penguatan kapasitas SDM yaitu kursus anti-korupsi bagi staf parlemen bekerja sama dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) di London, Inggris, penguatan jejaring regional dan global melalui kehadiran pada Sidang Umum Parlemen ASEAN/ *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) ke-44 di Jakarta awal Agustus lalu, Sidang Umum parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-146 dan 147 masing-masing Bahrain dan Angola, hingga Sidang dan Konferensi SEAPAC yang mengangkat tema "Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia".

Yang terbaru, Fadli Zon juga melaporkan partisipasinya dalam Forum Parlemen atau the *10th Forum of Parliamentarians* (FoP) yang menjadi salah satu agenda khusus dari the *10th Conference of the State Parties to UN Convention against Corruption* (CoSP UNCAC), konferensi negara pihak dari konvensi PBB melawan korupsi yang diselenggarakan di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada 11-15 Desember 2023. Persiapan Sidang CoSP UNCAC dan FoP berikutnya yang rencananya akan dihelat akhir 2025 mendatang di Doha, Qatar juga turut menjadi topik bahasan Sidang Komite Eksekutif GOPAC tersebut. (ssb/rdn)

© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.

Light

Ketua BKSAP Promosikan Peran Parlemen dalam Pemberantasan Korupsi di Forum GOPAC

BERITA

[Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon saat memimpin Dialog Parlemen tentang 20 tahun Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) di Doha, Qatar. Foto: lst/nr]

Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang tergabung dalam Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi (GOPAC) aktif mempromosikan pentingnya peran dan keterlibatan parlemen dalam pemberantasan korupsi global pada rangkaian Dialog Parlemen tentang Konvensi Antikorupsi PBB/*Parliamentary Dialogue on UNCAC* dan *Annual General Meeting* yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 8-9 Maret 2023.

Ketua BKSAP DPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua jaringan antar parlemen global anti-korupsi GOPAC, Dr. Fadli Zon, dalam memimpin Dialog Parlemen tentang 20 tahun Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC), menekankan perlunya komitmen kuat parlemen dan pihak terkait untuk memastikan efektivitas implementasi konvensi tersebut.

“Parlemen harus berada di garis terdepan untuk memastikan implementasi penuh UNCAC di tiap negara. Karena efektivitas dan kesuksesan implementasi UNCAC bergantung pada situasi sosial politik dan sistem hukum yang berbeda, parlemen harus mampu mengadaptasi komitmen global ini agar sesuai dengan konteks nasional masing-masing negara, dan memastikan implementasinya di tingkat nasional untuk pemberantasan korupsi dan memenuhi kebutuhan rakyat secara substansial,” tutur Fadli dalam pernyataan resminya membuka forum diskusi pada hari pertama penyelenggaraan konferensi, Rabu (8/3/2023).

Sebagai satu-satunya instrumen internasional yang mengikat secara hukum tentang anti-korupsi, sejak diadopsi pada tahun 2003 dalam Sidang Umum PBB, UNCAC telah mencapai kepatuhan yang hampir universal dengan disetujui dan diterapkan oleh 189 negara di seluruh

dunia. Termasuk juga Indonesia, yang telah menandatangani Konvensi tersebut pada 18 Desember 2003 di Merida, Meksiko, dan secara penuh meratifikasinya dalam UU No. 7 tahun 2006 pada 19 September 2006.

Pada dialog yang dipimpin Fadli Zon tersebut, para ahli dan anggota parlemen yang hadir sepakat bahwa peran parlemen sangat signifikan, tidak hanya dalam menerjemahkan komitmen global UNCAC dalam kerangka kebijakan nasional melalui ratifikasi, tetapi juga dalam pengawasan terhadap implementasinya yang dilakukan oleh pemerintah.

Resolusi PBB 8/14 yang diadopsi pada *Conference of the State Parties* (CoSP) UNCAC sesi ke-8 tahun 2019 juga menegaskan bahwa parlemen dan anggota parlemen memiliki peran kunci dalam pemberantasan korupsi. “Kami mengharapkan kemitraan yang lebih kuat dan strategis antara parlemen dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra internasional dan lembaga pembangunan untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen dalam bidang ini,” lanjut Fadli.

Sebelum rangkaian forum utama dimulai, Fadli Zon diundang untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Qatar, H.E. Hassan bin Abdullah Al-Ghanim pada Rabu (8/3). Pada pertemuan tersebut, Ketua Parlemen Qatar meminta dukungan dari DPR RI terkait kerja sama *Emergency Item* terkait ‘Kriminalisasi penghinaan terhadap agama dan penyebaran kebencian, serta mempromosikan koeksistensi, toleransi, perdamaian, dan keamanan internasional’ yang diajukan Qatar pada Sidang Umum *Inter-Parliamentary Union* (IPU) yang akan diselenggarakan di Manama, Bahrain, pada 11-15 Maret 2023.

Fadli Zon yang akan menjadi Ketua Delegasi DPR RI pada sidang IPU mendatang, menyatakan siap bersinergi dan berdiskusi lebih lanjut terkait dukungan Indonesia terhadap isu tersebut. “Tidak hanya anti-korupsi yang kita bahas dan sepakati bersama dalam forum ini, tetapi juga kesamaan pandangan bahwa Islamofobia juga harus dikecam dan

dihentikan, karena hal tersebut menunjukkan intoleransi yang nyata dan memicu konflik," tuturnya dalam mendukung *Emergency Item* yang diajukan oleh Ketua Parlemen Qatar tersebut.

Pada hari kedua, Kamis (9/3), Fadli Zon yang juga merupakan Ketua jaringan regional GOPAC di Asia Tenggara (SEAPAC) turut mendampingi Ketua GOPAC, H.E. Dr. Ali Fetais Al-Marri dalam memimpin *Annual General Meeting*/Rapat Tahunan organisasi. Pada penyampaian laporan tiap kawasan, Fadli Zon menjelaskan fokus SEAPAC untuk memperkuat kapasitas parlemen Asia Tenggara dalam bidang anti-korupsi.

"Di tahun 2023, SEAPAC telah sepakat untuk menyusun berbagai produk riset dan analisis terkait isu anti-korupsi di kawasan untuk memperkuat kapasitas parlemen, salah satunya terkait panduan pengawasan transparansi dan pengelolaan utang luar negeri, serta status implementasi UNCAC di negara-negara Asia Tenggara," ujar Fadli Zon pada rapat tersebut.

Di sela-sela rangkaian kegiatan selama dua hari ini, delegasi DPR RI yang juga terdiri dari Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera dan Achmad Hafisz Tohir, serta Anggota BKSAP Ina Ammania dan Ravindra Airlangga, juga bertemu dan mengeksplorasi potensi kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang anti-korupsi global melalui kerangka GOPAC; antara lain Mantan Ketua Komite Ad-Hoc Negosiasi UNCAC H.E. Muhyieddeen Shaban, Ketua Anti-Korupsi dan Kejahatan Ekonomi UNODC Giovanni Gallo, Direktur Kerja Sama dan Inklusi Sosial UNITAR Alex Meija, serta para anggota parlemen yang mewakili wilayah Afrika, Arab, Amerika Latin, dan Oseania.

Forum ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 26 negara, dari total 64 parlemen dunia yang tergabung dalam jaringan GOPAC. Pertemuan ini dilaksanakan setiap tahun untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik antar anggota parlemen mengenai berbagai kerja sama anti-korupsi meliputi pencegahan, penegakkan hukum dan

pemidanaan, kerja sama internasional, bantuan teknis, pemulihan aset dan mekanisme peninjauan implementasi Konvensi Anti-Korupsi PBB. (sbb/aha)

BERITA DPR RI

World Water Forum 2024 Bali Hadirkan Sumbangsih Pikiran Ilmuwan Guna Jadi Resolusi bagi Pengambil Kebijakan

Parlemen Indonesia-Jepang Tingkatkan Kerja Sama di Bidang SDM, Teknologi, dan Pertukaran Budaya

Indonesia dan Zimbabwe Pererat Kerja Sama, Berikan Manfaat Diberbagai Bidang

Pererat Kerja Sama Indonesia dan Norwegia dalam Jalinan 74 Tahun Hubungan Diplomatik

Fadli Zon Kembali Jabat Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia Untuk Palestina

BKSAP Dorong Partisipasi Parlemen Papua Nugini Sukseskan 'The Second IPPP'

Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kecam Veto AS terkait Palestina, Ketua BKSAP Ingatkan Konsekuensinya

BKSAP DPR RI, SEAPAC, WFD Perdalam Isu Suap Melalui Studi Perbandingan

BERITA

[Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam forum yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Foto: Singgih/Man]

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama South East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) menyelenggarakan Webinar Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia).

Dalam forum yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021) ini, BKSAP DPR RI berupaya memfasilitasi penguatan rezim anti suap di kawasan Asia Tenggara melalui diplomasi parlemen dalam kerangka organisasi SEAPAC.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa isu suap perlu diwaspadai, mengingat ada indikasi potensi kejahatan tersebut meningkat saat dunia dilanda pandemi Covid-19. Sementara di sisi lain, pemberantasan suap merupakan prioritas sejak diadopsinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

“Upaya untuk merumuskan aturan anti-suap berkembang cukup pesat di kawasan Asia Tenggara. Saya mengucapkan terima kasih kepada WFD, yang juga menyediakan analisis perbandingan sebagai perangkat esensial untuk membantu memperkuat rezim anti-suap,” ucap Fadli yang juga sebagai Presiden SEAPAC ini.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, peran parlemen sangat penting, terutama dalam sisi pembuatan legislasi. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai anti suap, tetapi perlu adanya modifikasi terutamanya di wilayah Asia Teggara ini. "Dari data yang ada, 80 persen kasus korupsi di Indonesia itu dari suap,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fadli sampaikan, diperlukan regulasi yang lebih kuat di dalam undang-undang untuk mengatur anti bribery (anti suap). Dengan kemajuan ilmu, beberapa perkembangan di Asia Tenggara semisal masuknya korporasi termasuk korporasi asing yang dikategorikan sebagai subyek hukum suap, seperti di Thailand maupun di Malaysia (korporasi sebagai subyek hukum).

“Dengan beragamnya mekanisme anti-suap di Asia Tenggara, forum Webinar menjadi sarana para anggota parlemen di Asia-Tenggara untuk berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran dalam isu anti-suap,” ujar Fadli Zon.

Dalam kesempatan yang sama Senior Governance Advisor WFD Franklin De Vrieze mengurai, pembahasan tersebut memiliki momentumnya ketika gerakan global anti korupsi semakin bergulir. Sepeti halnya UN yang baru saja menyelenggarakan *General Assembly Special Session on Anti-Corruption.*

“G7 juga mengambil langkah signifikan untuk memerangi penyuapan terhadap pihak asing. G20 juga melalui *Working Group Anti-Corruption* dan dalam waktu dekat *International Democracy Summit* akan juga menggarisbawahi isu anti-korupsi,” terangnya.

Dalam penanganan korupsi, Franklin menekankan tidak adanya pendekatan umum yang sama. Pengetahuan dan keahlian juga tidak cukup. “Juga diperlukan *political will* dan ini bukan hal yang tetap. Ia berkembang, dapat dibangun dan dipelihara,” urai Franklin. (skr/es)

EN ID

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Fadli Zon Kembali Terpilih menjadi Ketua Organisasi SEAPAC

01-03-2023 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon saat kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025. Foto: Ane/rni

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025. Fadli Zon yang sebelumnya Ketua SEAPAC kembali terpilih sebagai ketua melalui pertemuan atau sidang (*assembly*) yang diadakan di Jakarta tanggal 27-28 Februari 2023.

Sidang ini juga memutuskan struktur organisasi yang baru untuk masa jabatan 2 tahun. Sebagai Ketua terpilih yaitu Dr. Fadli Zon dari Indonesia, Wakil Ketua yaitu Lee Chean Chung dari Malaysia dan Adriano Do Nascimento dari Timor Leste, Sekretaris yaitu Dr. Mardani Ali Sera dari Indonesia, Bendahara terpilih yaitu Putu Supadma Rudana dari Indonesia.

Sidang SEAPAC berbarengan dengan diadakannya Konferensi dan Sidang Umum SEAPAC yang mengusung tema "Aksi Parlemen terhadap Pengawasan Keuangan Politik dan Pemberantasan *Green Corruption* di Asia Tenggara". SEAPAC merupakan organisasi regional di Kawasan Asia Tenggara yang menaungi para anggota parlemen yang menjunjung nilai-nilai anti korupsi.

Dalam sidang itu, Indonesia mengusulkan Rencana Aksi Regional SEAPAC untuk tahun 2023, yang akan memprioritaskan penelitian dan advokasi pengetahuan. SEAPAC akan memberikan lebih banyak produk pengetahuan kepada anggota parlemen, termasuk melalui pengembangan basis data pengetahuan regional tentang isu-isu spesifik. Harapannya, anggota dari negara yang berbeda dapat memiliki pengetahuan komparatif dari rekan mereka untuk membantu mereka mengembangkan pengawasan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.

Kedepannya, SEAPAC juga akan mengembangkan produk pengetahuan yang berbasis regional seperti buku panduan, arah kebijakan, penelitian, laporan, dan panduan penilaian. SEAPAC juga akan meluncurkan buku yang bertajuk '*Parliamentary Handbook on the Foreign Debt Oversight in Southeast Asia*' dan '*Gap Analysis and State of Implementation of the UNCAC in the region*.'

Di sela-sela pertemuan, Fadli Zon menyatakan bahwa sebagai jaringan parlementer yang berdedikasi pada isu-isu antikorupsi, SEAPAC berkomitmen untuk membina, berkolaborasi, mengadvokasi, dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik di tingkat regional dan internasional.

Fadli Zon juga menegaskan bahwa SEAPAC akan terus mendukung anggota parlemen untuk memperkuat peran kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui mandat konstitusional mereka agar menjadi semakin signifikan dalam menjaga demokrasi bagi rakyat. Diharapkan organisasi ini terus menjalankan misinya dalam menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dan juga semakin banyak partisipasi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara yang mengimplementasikan norma ini. (ann/aha)

Kerja Sama WFD dan SEAPAC, Fadli Zon Buka Kursus Integritas dan Antikorupsi bagi Staf Parlemen Negara ASEAN

BERITA

[Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat menjadi Presiden South-East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) membuka acara kursus integritas dan antikorupsi, pada Senin (20/11/2023). Foto: lst/nr]

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya memperkuat kapasitas dari staf Parlemen Negara Asia Tenggara terkait isu-isu antikorupsi. Hal itu disampaikan Fadli selaku kapasitasnya juga sebagai Presiden *South-East Asia Parliamentarians against Corruption* (SEAPAC), saat membuka acara dalam kursus integritas dan antikorupsi, pada Senin (20/11/2023).

Ia menegaskan penguatan keahlian para staf parlemen juga berarti memperkuat parlemen secara keseluruhan. “Anggota parlemen dapat datang dan pergi. Tetapi ada yang tetap bekerja di parlemen yakni para pegawai parlemen,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima ***Parlementaria***, di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

SEAPAC merupakan sebuah jaringan antaranggota Parlemen Asia Tenggara yang fokus pada isu korupsi dan tata kelola yang baik. Adapun acara kursus itu sendiri dalam rangka memfasilitasi penguatan kapasitas staf parlemen dalam kursus antikorupsi, di *Westminster Foundation for Democracy* (WFD), London, UK, 20-25 November 2023.

Anggota Parlemen datang dan pergi. Tetapi, ada yang tetap bekerja di Parlemen, yakni para pegawai Parlemen. Karena itu, pegawai Parlemen harus punya kemampuan untuk menutup celah kuat korupsi dengan cara memperkuat kapasitas dan menerapkan dukungan antikorupsi kepada Anggota Parlemen

Program penguatan kapasitas yang dikembangkan bersama antara

Program penguatan kapasitas yang dikembangkan bersama antara SEAPAC dan *the Westminster Foundation for Democracy* (WFD) diikuti oleh sedikitnya 15 staf parlemen terdaftar dan berpartisipasi baik daring maupun luring dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yakni Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia hingga Timor Leste. Program penguatan kapasitas bertajuk *Integrity and Anti-Corruption Course* tersebut menargetkan staf parlemen yang bekerja pada isu-isu antikorupsi ataupun yang terkait aktivitas SEAPAC dan *Global Organization of Parliamentarians against Corruption* (GOPAC).

Fokus program adalah B*uilding Resilient Institutions: Enhancing Parliamentary Capacities and Accountability for Anti-Corruption and Public Debt Oversight*. Dari waktu ke waktu, lembaga legislatif telah memiliki sejumlah pencapaian dalam pemberantasan korupsi. Namun, korupsi juga berevolusi dan beroperasi dalam celah maupun kekosongan hukum.

“Idealnya kita dapat menutup celah hukum tersebut. Dan salah satu jalannya adalah dengan memperkuat kapasitas staf parlemen dalam memahami korupsi, menerapkan dukungan antikorupsi kepada anggota parlemen saat DPR menjalankan tugasnya,” sambung Politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Direktur Asia, Pacific dan Amerika, WFD, Ambassador Matthew Hedges, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama yang telah terjalin antara BKSAP DPR RI dengan WFD, dan secara lebih lanjut dengan SEAPAC. Ia menyambut baik pelaksanaan program ini dan berharap terjadi diskusi perbandingan antara praktik pemberantasan korupsi di Inggris dengan di negara lainnya.

Kepala Praktik Akuntabilitas WFD, Franklin De Vrieze, menerangkan program penguatan kapasitas SEAPAC-WFD Integrity and Anti-Corruption Course tersebut berlangsung selama 20 jam kursus dengan 15 pakar dari berbagai lembaga yang ada di UK seperti Pusat Studi Korupsi, Sussex University, Transparency International UK

Korupsi, Sussex University, Transparency International UK, Parliamentary Commissioner for Standards, UK National Audit Office, University of Nottingham, University of Liverpool hingga U4 Anti-Corruption Resources.

Ke depan, SEAPAC dengan dukungan dan fasilitasi BKSAP, dapat menindaklanjuti program terkait dengan penyusunan *knowledge product* yang akan bermanfaat untuk para anggota parlemen di Asia Tenggara.

SEAPAC-*WFD Integrity and Anti-Corruption Course* terdiri dari delapan modul pembelajaran meliputi pengenalan terhadap korupsi dan kerangka pengaturannya, hingga strategi baru yang diperlukan dalam penguatan peran parlemen dalam pemberantasan korupsi dan pemajuan tata kelola. (gal/rdn)

BERITA DPR RI

World Water Forum 2024 Bali Hadirkan Sumbangsih Pikiran Ilmuwan Guna Jadi Resolusi bagi Pengambil Kebijakan

Parlemen Indonesia-Jepang Tingkatkan Kerja Sama di Bidang SDM, Teknologi, dan Pertukaran Budaya

Indonesia dan Zimbabwe Pererat Kerja Sama, Berikan Manfaat Diberbagai Bidang

Pererat Kerja Sama Indonesia dan Norwegia dalam Jalinan 74 Tahun Hubungan Diplomatik